

**PENGARUH INVESTASI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH BALI TIMUR**

**Ida Ayu Trisna Diannita¹
I Wayan Wenagama²**

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: trisna_diannita@yahoo.com/ Telp: 087704535355

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu investasi dan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh investasi dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur, (2) menganalisis pengaruh investasi dan pendapatan asli terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur, dan (3) menganalisis pengaruh tidak langsung investasi dan pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 27 pengamatan, yang dianalisis dengan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan *Eviews9*. Hasil analisis menunjukkan investasi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: investasi, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

*Economic growth is an indicator to measure the success of economic development. Community welfare is the goal of economic growth. Some factors that can improve the welfare of the community are investment and local original income. The purpose of this study is (1) to analyze the effect of investment and local own-source revenue on economic growth in the East Bali Region, (2) analyze the effect of investment and original income on the welfare of the people in Wilaya, East Bali, and (3) analyze the indirect effect of investment and income indigenous to the welfare of society through economic growth in the East Bali Region. The data used are secondary data with 27 observations, which were analyzed by path analysis techniques with *Eviews9*. The analysis shows that regional investment and original income have a positive and significant influence on economic growth. Investment has a positive and significant impact on people's welfare. Local original income has a positive but not significant effect on people's welfare. Economic growth has a positive and significant impact on people's welfare. Regional original investment and income does not indirectly affect the welfare of the community through economic growth.*

Keywords: investment, regional original income, economic growth, community welfare

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi terdiri dari perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan pendapatan. Produk domestik regional bruto merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dimana mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian (Chindy et al., 2016). Tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah (Eriek Estrada dan Wenagama, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ukuran kualitas dilaksanakan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum tidak hanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosial (Suartha, 2017). Kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Widiana dan Sudiana, 2015). Pemerintah Indonesia Pada Tanggal 1 Januari 2001

merencanakan desentralisasi (otonomi daerah) sebagai perubahan dari sistem sentralisasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (Kuncoro, 2004:18). Terdapat dua undang-undang yang melandasi otonomi daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Kuncoro, 2004:20). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Kebijakan otonomi daerah yang dijalankan Indonesia saat ini memberikan kesempatan besar bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kesuma, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menghasilkan lapangan kerja baru sehingga mampu menjamin pentingnya kondisi ekonomi dan pembangunan di dalam suatu daerah sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan tindakan dalam meningkatkan intensitas pertumbuhan ekonomi agar tingkat pengangguran berkurang (Herman, 2011). Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan (Kaur 2016). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Schumpeter mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya

jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi dalam produksi (Rustariyuni, 2014).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Akudugu, 2012). Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan dimana beberapa kebutuhan dari masyarakat tergantung dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki untuk bisa memenuhi kebutuhannya (Al-Bassam, 2013). Kualitas sumber daya manusia mencerminkan kualitas bangsa (Bendesa, 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diukur dengan tiga standar indeks yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Hariwan, 2012).

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Jembrana	68.67	69.66	70.38	70.72	71.65	70.10
Tabanan	72.68	73.54	74.19	74.86	75.45	74.04
Badung	77.98	78.86	79.80	80.54	80.87	79.50
Gianyar	74.29	75.03	75.70	76.09	76.61	75.45
Klungkung	68.30	68.98	69.31	70.13	70.90	69.43
Bangli	65.75	66.24	67.03	68.24	68.98	67.13
Karangasem	64.01	64.68	65.23	65.57	66.49	65.10
Buleleng	69.19	70.03	70.65	71.11	71.70	70.44
Denpasar	81.65	82.24	82.58	83.01	83.30	82.49
Provinsi Bali	72.48	73.27	73.65	74.3	74.77	72.63

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan IPM Provinsi Bali dan tiap Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata IPM provinsi Bali dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 74,77 persen. Kota Denpasar memiliki tingkat IPM tertinggi sebesar 82.49 persen, kemudian di susul posisi kedua Kabupaten Badung sebesar 79,50 persen, dan di posisi ketiga Kabupaten Gianyar sebesar 75,45 persen. Namun masih terdapat kabupaten yang memiliki IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali, seperti di Daerah Bali Timur yang hampir setiap tahun memiliki angka IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali. Daerah Bali Timur yakni Kabupaten Klungkung memiliki IPM sebesar 69,43 persen, Kabupaten Bangli memiliki IPM sebesar 67,13 persen dan kabupaten Karangasem memiliki IPM sebesar 65,10 persen.

Perbedaan IPM di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, keberadaan sumber daya yang berbeda di setiap kabupaten sehingga menyebabkan perbedaan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadinya disparitas pendapatan antar daerah (Oka et al., 2015).

Kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan perubahan terhadap kesejahteraan daerah (Zouhaier, 2012). Pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan sumber daya kepada pemerintah kabupaten dan kota bukan provinsi (Fitriani et al., 2005).

Desentralisasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan potensi untuk mengurangi kemiskinan (Miranti et al., 2014). Desentralisasi adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Malik & Hussain, 2014). Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga daerah mampu mengalokasikannya untuk membangun fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ogujiuba dan Abraham, 2012). Kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan perubahan terhadap kesejahteraan daerah (Zouhaier, 2012).

Otonomi daerah di Indonesia Pada Tahun 2001 mencoba untuk melakukan pemerataan dengan mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal serta memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerah (Irawan, 2015). Implementasi dari otonomi daerah yang tercermin dari tingkat kemandirian keuangan di beberapa daerah masih berada dalam skala yang sangat rendah. Keberhasilan pemerintah daerah peningkatan pendapatan daerah seharusnya harus diimbangi oleh peningkatan kinerja ekonomi daerah dalam membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah akan lebih didengar dalam memenuhi pilihan daerah yang beraneka ragam sehingga lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Fajri dkk., 2016). Upaya meningkatkan kesejahteraan yang efektif yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (De Silva dan Sumarto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi. Investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin (Yusuf dan Sumner, 2015). Pemerintah daerah dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan (Dalamagas, 2000). Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakikatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi (Adnan, 2011). Investasi yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga bertujuan untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat (Hendra Kusuma, 2016). Investasi sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam proses produksi, tambahan investasi menjadi pelipatgandaan *output* yang membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga akan memperluas kesempatan kerja serta berdampak terhadap naiknya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pun mengalami peningkatan. Peningkatan kesempatan kerja tergantung dari besar kecilnya investasi yang ditanamkan suatu negara (Ari Surya Permana dan Wenagama, 2015).

Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah selain potensi sumber daya alam yang menarik ialah kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan dan angka korupsi suatu daerah. Investasi merupakan kunci dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Lindblad, 2015). Investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan,

pengurangan kemiskinan perlu mendapatkan perhatiannya serius. Pada kenyataan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2011). Investasi sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat berdampak terhadap naiknya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pun mengalami peningkatan. Peningkatan kesempatan kerja tergantung dari besar kecilnya investasi yang ditanamkan suatu negara (Wenagama, 2013).

Menurut Teori pertumbuhan dari Harrod Domar (1948), bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Peningkatan investasi (barang modal) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan jika investasi berkurang maka pertumbuhan ekonomi akan menurun (Luh dan Yuni, 2013).

Pembangunan yang optimal diharapkan akan membuat masyarakat sejahtera dan akan lebih baik jika pembangunan didukung dengan dana dan sumber daya manusia yang baik agar lebih efektif. Sumber dana ini diberikan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kesuma, 2015). Melalui kontribusi PAD pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercipta sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Hendra Kusuma, 2016). Semakin baik

daerah mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang di terima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmawan dan Wenagma, 2017)

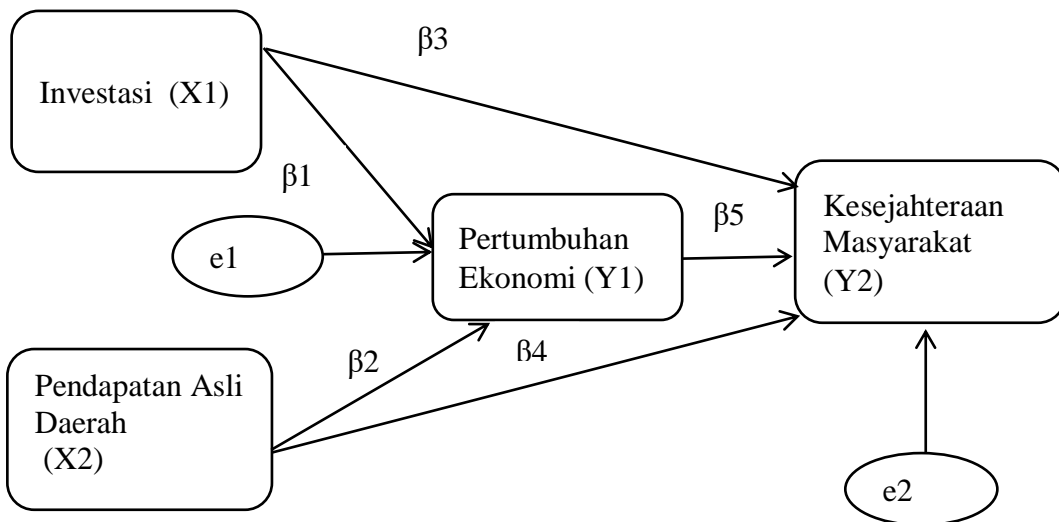
Realisasi penerimaan PAD di Wilayah Bali Timur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Menurut Dispenda Provinsi Bali, penerimaan PAD di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali bersumber dari 9 jenis pajak yang dikelola yaitu: hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB), dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) (Bayu dan Bela, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh investasi dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur, (2) menganalisis pengaruh investasi dan pendapatan asli terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur, (3) menganalisis pengaruh tidak langsung investasi dan pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Bali Timur yang diakses melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, karena nilai IPM pada Wilayah Bali Timur (Klungkung, Bangli dan Karangasem) terdapat perbedaan dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, sehingga kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata. Penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan data investasi, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia.. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Eviews9*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti dan wawancara mendalam yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung dengan responden). Data diakses dari BPS Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2010-2018. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *path analysis* atau analisis jalur.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Investasi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali

Gambar 1.1 dapat dilihat anak panah β_1 menunjukkan pengaruh secara tidak langsung variabel X_1 terhadap Y_2 melalui intervening Y_1 . Pada anak panah β_3 menunjukkan pengaruh X_1 secara langsung terhadap Y_2 . Pada anak panah β_2 menunjukkan variabel X_2 secara tidak langsung berpengaruh terhadap Y_2 melau

variabel intervening Y_1 . Anak panah β_4 menunjukkan pengaruh langsung variabel X_2 terhadap Y_2 , terdapat dua persamaan struktural yaitu:

$$\text{Persamaan sub struktural I : } Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Persamaan sub struktural II : } Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X_1 = Investasi
- X_2 = Pendapatan Asli Daerah
- Y_2 = Kesejahteraan Masyarakat
- e_1, e_2 = variabel pengganggu
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien dari masing-masing variabel

e_1 variabel pertumbuhan ekonomi Y_1 menunjukkan jumlah variansi variable pertumbuhan ekonomi Y_1 yang tidak dijelaskan oleh investasi (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2). Anak panah e_2 variabel kesejahteraan masyarakat (Y_2) menunjukkan jumlah variansi variable kesejahteraan masyarakat (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh investasi (X_1), pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi (X_1).

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots\dots\dots (3)$$

Standardize koefisien pada persamaan (1) akan memberikan nilai β_1 dan β_2 standardize koefisien pada persamaan (2) akan memberikan nilai β_3, β_4 dan β_5 . Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - P_{e_1}^2 P_{e_2}^2 \dots\dots\dots (4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap R_m^2 sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi. P_{e_i} yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumus :

$$P_{ei} = \sqrt{(1 - r^2)} \dots \dots \dots (5)$$

Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening dengan Uji Sobel

1) Uji mediasi variabel pertumbuhan ekonomi(Y₁) atas investasi (X₁) terhadap kesejahteraan masyarakat(Y₂). Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{b_5^2 S_1^2 + b_1^2 S b_5^2} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

Sb₁ = standar eror koefisien regresi variabel X₁ terhadap Y₁

Sb₅ = standar eror koefisien regresi variabel Y₁ terhadap Y₂

$$Z = \frac{\beta_1 \beta_5}{S_{\beta_1 \beta_5}} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

b₁ = koefisien pengaruh variabel X₁ terhadap Y₁

b₅ = koefisien pengaruh variabel Y₁ terhadap Y₂

2) Uji mediasi variabel pertumbuhan ekonomi(Y₁) atas hubunganpendapatan asli daerah (X₂) terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y₂).Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_2}^2 + b_2^2 S b_5^2} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan :

Sb₂ = standar eror koefisien regresi variabel X₂ terhadap Y₁

Sb₅ = standar eror koefisien regresi variabel Y₂ terhadap Y₂

$$Z = \frac{\beta_2 \beta_5}{S_{\beta_2 \beta_5}} \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan :

b_2 = koefisien pengaruh variabel X_2 terhadap Y_1

b_5 = koefisien pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Provinsi Bali dengan luas wilayah yang hanya 5,636,66 km² atau 0,29 persendari luas wilayah di Indonesia. Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Provinsi Bali dengan luas wilayah yang hanya 5,636,66 km² atau 0,29 persen dari luas wilayah di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut:Utara : Laut Bali, Selatan: Samudera Indonesia, Barat : Selat Bali, Timur : Selat Lombok.Secara administratif Provinsi Bali terbagi ke dalam sembilan kabupaten/kota (8 kabupaten dan 1 kota), 55 kecamatan, 692 Desa atau Kelurahan, 1.418 Desa Adat dan 3.945 Banjar/adat. Kabupaten/kota di Provinsi Bali meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Daerah Bali Timur terdiri atas Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Secara administratif Kabupaten Karangasem terdiri dari dari 8 kecamatan, dengan 78 desa/kelurahan, 532 banjar dinas, 52 lingkungan. Sedangkan secara adat, Kabupaten Karangasem terdiri dari 189 desa adat dengan 605 banjar adat.Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, dan 75 desa. Kabupaten ini memiliki dua Pelabuhan yakni Padang Bai dan Tanah Ampo. Di

kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

Utara : Laut Jawa

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng

Timur : Selat Lombok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.2 Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan Antar variabel	Coefficient	Std Error	T-statistic	Prob.	Keterangan
$X_1 \longrightarrow Y_1$	0.558	1.633	11.567	0.000	Positif dan Signifikan
$X_1 \longrightarrow Y_2$	0.212	0.302	2.112	0.046	Positif dan Signifikan
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0.747	0.599	2.196	0.038	Positif dan Signifikan
$X_2 \longrightarrow Y_2$	0.001	0.046	0.079	0.937	Positif namun Tidak Signifikan
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0.071	0.014	4.270	0.000	Positif dan Signifikan

Keterangan :

X_1 : Investasi

X_2 : Pendapatan Asli Daerah

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dijelaskan bahwa variabel investasi (X_1) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 atau kurang dari 5 persen. Variabel investasi (X_1) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.046. Variabel pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.038. Variabel pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.937, ini berarti pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hubungan antar variabel penelitian secara lengkap juga disajikan pada diagram jalur Gambar 1.2.

Berdasarkan Gambar 1.2 dan juga Tabel 1.2 dapat dibuat estimasi persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = 0.558X_1 + 0.747X_2$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = 0.212X_1 + 0.001X_2 + 0.071Y_1$$

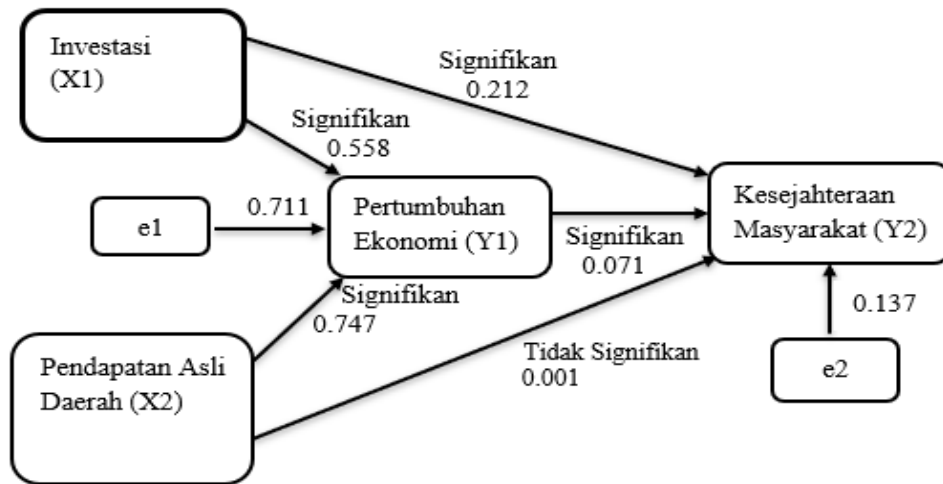
Keterangan:

X_1 :Investasi

X_2 : Pendapatan Asli Daerah

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat



Gambar 1.2 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel Penelitian

Sumber: Lampiran 5, 6, dan 7

Berdasarkan Gambar 1.2 dan juga Tabel 1.2 variabel yang mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) adalah variabel

pendapatan asli daerah dengan koefisien jalur sebesar 0.747, sedangkan variabel investasi memiliki koefisien jalur sebesar 0.558. Variabel kesejahteraan masyarakat (Y_2) paling besar dipengaruhi oleh variabel investasi (X_1) dengan koefisien jalur sebesar 0.212, kemudian disusul oleh variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 0.071. Sedangkan PAD (X_2) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y_2) dengan koefisien jalur sebesar 0.001.

Tabel 1.3 Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) Variabel Penelitian

Hubungan Antarvariabel	Variabel Mediasi	axb	Sab	Z	Keterangan
$X_1 \longrightarrow Y_2$	Y_1	1.190	0.083	1.433	Tidak Signifikan
$X_2 \longrightarrow Y_2$	Y_1	0.018	0.031	0.594	Tidak Signifikan

Keterangan:

- X_1 :Investasi
- X_2 : Pendapatan Asli Daerah
- Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi
- Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel investasi (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki nilai axb sebesar 1.190 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung investasi (X_1) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tidak langsung variabel pendapatan asli daerah (X_2) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki nilai axb sebesar 0.018 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara

tidak langsung variabel pendapatan asli daerah (X_2) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui nilai pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.558. Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.747. Pengaruh langsung investasi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.212. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.001. Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.071. Pengaruh tidak langsung investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1.190. Nilai pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.01

Tabel 1.4 Koefisien Hubungan Langsung, Tidak Langsung, dan Total Antar Variabel

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
$X_1 \longrightarrow Y_1$	0.558		0.935
$X_1 \longrightarrow Y_2$	0.212	1.190	1.100
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0.747		3.003
$X_2 \longrightarrow Y_2$	0.001	0.018	0.615
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0.071		0.585

Sumber: Lampiran 5, 6, dan 9

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur. Investasi merupakan faktor penting yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi suatu daerah, dengan adanya hal tersebut membuat pemerintah di seluruh daerah terutama berlomba-lomba untuk terus

meningkatkan investasi di daerahnya. Ketepatan pemerintah dalam menentukan kebijakan arah investasi ke daerah-daerah dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah. Terserapnya tenaga kerja, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat, apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Suwandika dan Mahaendra Yasa, (2015), dimana dalam penelitiannya menuliskan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2002-2012 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 1993 – 2013 di Provinsi Bali (Istri Diah Paramita dan Purbadharmaja, 2015).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur. Hubungan positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini, sejalan dengan teori W.W. Rostow yang menyatakan bahwa tahap prasyarat tinggal

landas masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan kekuatan sendiri dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis (Arsyad,2004). Mega Rosita dan Sutrisna (2018) juga mendukung penelitian ini dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan memiliki pengaruh signifikan positif untuk pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2016. Mawarni, dkk (2013), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Aceh.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan memberikan dampak pada perencanaan pembangunan daerah sehingga bila pembangunan daerah berjalan baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat dikatakan dengan peningkatan pendapatan asli daerah berarti mampu juga meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur.

Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Hubungan positif dan signifikan antara variabel investasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian Royan,dkk (2015) menyatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran, akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya kegiatan investasi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli

masyarakat yang merupakan bagian dari komponen Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

Wihardjo (2014) menyatakan ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Raicevicl, et al.,(2016) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007 – 2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suciati, dkk (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007 – 2012 investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pendapatan asli daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Bali Timur. Hal ini berarti tidak sejalan dengan hipotesis penelitian, artinya bahwa pendapatan asli daerah masih belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang merupakan pendapatan daerah yang menjadi dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan belanja daerah untuk kesejahteraan. Pengalokasian PAD seharusnya digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur yang dapat

menunjang bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan potensi wilayah sehingga komponen dalam IPM dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Muhtarom(2015) yang menyatakan bahwa adanya hasil yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kesejahteraan masyarakat disebabkan pendapatan asli daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan tidak signifikan karena jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus naik namun tidak diikuti oleh Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan beranjak naik. Hingga indeks daya beli masyarakat Lamongan yang cenderung naik namun tidak terlalu besar. Menjadikan variabel penelitian tidak signifikan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Bali Timur. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang positif signifikan, penelitian ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi Rostow yang membagi proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap pembangunan yakni masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap masa konsumsi tinggi (Arsyad, 2010;62). Rostow menyatakan prasyarat agar bisa tinggal landas, suatu negara harus dapat membangun pertanian, industri dan perdagangannya sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka perhatian

masyarakat bukan lagi pada masalah produksi melainkan dapat lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Indrajaya (2019), Herni Wijayanti dan Darsana (2015) serta Rosita dan Sutrisna (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada penelitian ini berarti bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui angka IPM yang mengalami peningkatan.

Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Hal ini berarti tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening investasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya investasi masih belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Artinya Lemahnya hubungan antara investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya dampak bahwa tingginya investasi yang lebih diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Semakin tinggi tingkat investasi maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Selain dapat memacu

pertumbuhan ekonomi, investasi juga memiliki *multiplier effect* bagi kegiatan ekonomi masyarakat. *Multiplier effect* yang dapat memacu timbulnya kegiatan lain dengan menggerakkan industri-industri lain untuk meningkatkan devisa, dan mampu menampung kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya kegiatan investasi ini memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakatnya. Investasi juga mempengaruhi peningkatan modal yang akan berdampak pada jumlah pengangguran semakin berkurang. Perkembangan investasi baru memungkinkan jika masyarakat mendapatkan kesempatan kerja sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Artinya bahwa investasi akan menambah lapangan pekerjaan, dan mengurangi pengangguran, dengan berkurangnya pengangguran maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Krisna Pratama dan Darsana (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel yang memediasi investasi terhadap kesejahteraan di Kabupaten/kota di Bali tahun 2011-2016 atau dengan kata lain investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali Timur

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening pendapatan asli

daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Hal ini berarti tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Herni Wijayanti dan Darsana (2015) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2008-2013.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan dapat dikarenakan sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh oleh Wilayah Bali Timur belum mampu dikelola dengan baik untuk biaya pembangunan. Sebagai contoh saat ini pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya berfokus pada pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dirasakan secara merata antar desa maupun kota di Wilayah Bali Timur. Apabila sumber-sumber pembiayaan digunakan dengan sebijak mungkin atau dengan kata lain pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dapat dilakukan secara seimbang, kemungkinan besar pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali Timur. Artinya dengan semakin tinggi investasi dan pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali Timur. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali Timur.

SARAN

Investasi di Wilayah Bali Timur hendaknya harus terus ditingkatkan melalui penyederhanaan proses perijinan dan mempermudah berinvestasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Wilayah Bali Timur yang nantinya dapat memicu timbulnya usaha-usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerjasehingga mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah harus lebih diintensifkan sehingga daerah akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Wilayah Bali Timur diharapkan lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang akan memberi kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

Adnan, P. E. P. 2011. Investment on the Community Income and the Economic Growth in Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 13(3), 195–212.

- Akudugu, J. A. 2012. Accountability in local government revenue management : who does what ? *Informatin and Knowledge Management*, 2(8), 22–33.
- Arifin, Syamsul. 2008. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*. PT. Elex Media Komputindo.Jakarta.
- Ari Surya Permana, I. G. A. dan I Wayan Wenagama. 2015. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi DI Provinsi Bali Tahun 1993-2013. *E-Jurnal EP Unud*.4 [4] : 230 - 242. ISSN: 2303-0178
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*.Edisi Keempat. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Al-Bassam, B. 2013. The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*, 2(2), 1–18.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2019. *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- Bayu, G., & Bela, K. 2016. Pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol . 8 . 1666–1696.ISSN : 2303-0178
- Bendesa, I. 2015. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter.*Piramida*, 10(1), 1–7.
- Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, A. O. N. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254.
- Dalamagas, B. 2000. Public sector and economic growth: The Greek experience. *Applied Economics*, 32(3), 277–288
- Darmawan, Agus Pande dan I Wayan Wenagama. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6[10]: 1868-1895.ISSN: 2303-0178
- De Silva, I., & Sumarto, S. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the

Poor?Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227–242.

Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Indeks, Jakarta.

Dwi Astuti, Riska. 2015. *Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013*. Skripsi (Dipublikasi). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Edogbanya, B., Sule, J. G., & Sule, G. 2013. Revenue generation : It's impact on government developmental effort (A study of selected local council in Kogi East Senatorial District). *Global Busines and Management Research Administration and Management*, 13(4), 12–26.

Effendi, Nary dan Setiawan, Maman. 2013. *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*. Salemba Empat. Jakarta.

Eriek Estrada dan I Wayan Wenagama. 2019. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [7]:1637-1665. ISSN 2303-0178

Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2).

Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. 2005. Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Halim, Abdul. 2011. *Analisis Investasi*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat

Hariwan, P. 2012. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat Analysis Of Human Development Index In Five Cities*.

Hendra Kusuma. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9(No. 1), 2.

Herman, Emilia. 2011. The Impact of Economic Growth Process on Employment in European Union Countries. *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, No.4

Herni Wijayanti, Ni Kadek dan Ida Bagus Darsana., 2015. Pengaruh Pendapatan

AsliDaerahdan DanaAlokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013. *E-Jurnal EP Unud*,4[3] : 1164-1193. ISSN : 2303-0178.

Hertanto, Indrajati dan Jaka Sriyana. 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota.*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* : Vol.12, No.1, April 2011. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Irawan, A. 2015. Regional income disparities in Indonesia: Measurements, convergence process, and decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 148–149.

Istri Diah Paramita, Anak Agung Istri dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, 2015. Pengaruh Investadi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EPUnud*, 4 [10]: 1194-1218 ISSN: 2303-0178.

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan*.Erlangga. Jakarta.

Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Buletin of Indonesian Economic Studies*. 8(2).

Kementerian keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2000. Indonesia.

Kementerian keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.2004. Indonesia.

Kementerian keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Indoensia.

Kesuma, Aprilia Ni Luh. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi KuantitatifTerapan* Vol. 8 No. 1.

Krisna Pratama,A.A dan Ida Bagus Darsana. 2019. Pengaruh Kemiskinan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [6]: 1300-1330 ISSN: 2303-0178

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*.Erlangga.Jakarta

- Lindblad, J. T. 2015. Foreign Direct Investment in Indonesia: Fifty Years of Discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217–237.
- Luh, N., Yuni, P. 2013. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, XI(1), 20–28.
- Malik, S., & Hussain, S. 2014. *Economic Fiscal Decentralisation in Pakistan Growth*. 45(4).
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5, no 2.
- Mawarni, dkk. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi* Volume 2, No.2: 80-90.
- Mega Rosita, Ida Ayu Putu dan I Ketut Sutrisna. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 [7]: 1445-1471 ISSN: 2303-0178.
- Meier, Clinard, Marshall B. dan Robert F. 1989. *Sociology of Deviant Behavior*. Chigago: Holt, Reinhart and Winston, Inc.
- Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 461–482.
- Muhtarom, Abid. 2015. Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal EKBIS* Vol. XIII/No.1.
- Ogujiuba, K., & Abraham, T. W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*, 4(11), 172–182.

- Oka, I. K., Yasa, A., Arka, S. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 4(2), 129–137.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Indonesia
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 1974. Indonesia
- Priyono, & Teddy Chandra. 2016. *Esensi Ekonomi Makro*, Penerbit Zifatama Publisher
- Raicevicl, Bozidar, Svetlana Ignjatijevic and Ivan Milojevic. 2016. *Financial Analysis Of Foreign Direct Investment On Economic Growth Of Developing Countries*. International Journal.
- Royan, M. M., Jumiati, A., & Prianto, F. W. 2015. Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur (*The Influence of Public and Private Investments to Increasing Human Development Index (HDI) in East Java*).
- Rustariyuni, S. D. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Piramida*, 10(1), 45–55.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Edukasi. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Materi ini disampaikan dalam Seminar Nasional: Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta.
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2):227-42.
- Soeratno. 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Suartha dan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan

- Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10(1): 95-107.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kesatu. Alfabeta. Bandung.
- Suciati, D. A.P., Budhi, M. K.S., dan Jayastra, K. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- . 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- . 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta
- Suyana Utama, Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Suwandika , Putu Eka dan Yasa , Nyoman Mahaendra. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. E- Jurnal EP Unud, 4 [7] : 794-810. ISSN 2303-0178.
- Tambunan, Tulus. 2006. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah. www.kardin-indonesia.or.id
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Todaro ,Michael P. dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di*

Dunia Ketiga. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

- Utami, Desak Nyoman dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2019. Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [10]: 2195 - 2225 ISSN: 2303-0178.
- Wenagama, I. W. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi Di Provinsi Bali Tahun 1993-2013. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia*. 230–242.
- Widiana, I. N. W., & Sudiana, I. K. 2015. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia*. 1357–1390. ISSN: 2303-0178
- Wihardjo, M.J., 2014. Hubungan antara Penanaman Modal Asing dan Kesejahteraan Penduduk Indonesia. *Jurnal Fakultas Bisnis dan Ekonomika*. Universitas Surabaya. Surabaya.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348.
- Zouhaier, H. 2012. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152–162.